



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 62 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 136 dan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dipandang perlu menetapkan pemberian uang persediaan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Kabupaten Magetan selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
2. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
3. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.
4. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja

daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit Kerja SKPD.

6. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran
7. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
8. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB II

PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pasal 3

- (1) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk pembayaran kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, yang bukan melalui pembayaran langsung.
- (2) Jumlah paling tinggi pagu Uang Persediaan bagi setiap SKPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Untuk keperluan pembayaran tunai sehari-hari, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu diijinkan mempunyai persediaan uang paling tinggi Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Pengajuan Pencairan Uang Persediaan dilakukan hanya sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan menggunakan SPP-UP, dan selanjutnya dapat diajukan kembali untuk pencairan dana dengan menggunakan SPP-GU.
- (2) SPP-GU selanjutnya diajukan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI MAGETAN,

Ttd

S U M A N T R I


Diundangkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

Ttd

MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 62 TAHUN 2015

TANGGAL : 31 Desember 2015

DAFTAR PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2016

NO	SATUAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
1.	2.	3.
1.	Dinas Pendidikan	Rp. 1.000.000.000,00
2.	Dinas Kesehatan	Rp. 1.500.000.000,00
3.	RSUD dr Sayidiman	Rp. 50.000.000,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum BMCK	Rp. 800.000.000,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	Rp. 400.000.000,00
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 400.000.000,00
7.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 250.000.000,00
8.	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 400.000.000,00
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp. 125.000.000,00
10.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Rp. 150.000.000,00
11.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 250.000.000,00
12.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Rp. 175.000.000,00
13.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 100.000.000,00
14.	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 175.000.000,00
15.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 100.000.000,00
16.	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Rp. 125.000.000,00
17.	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Rp. 200.000.000,00
18.	Bagian Hukum	Rp. 80.000.000,00
19.	Bagian Administrasi Pembangunan	Rp. 100.000.000,00
20.	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam	Rp. 80.000.000,00


1	2	3
21.	Bagian Administrasi Perekonomian	Rp. 125.000.000,00
22.	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Rp. 80.000.000,00
23.	Bagian Umum	Rp. 500.000.000,00
24.	Bagian Humas dan Protokol	Rp. 100.000.000,00
25.	Sekretariat DPRD	Rp. 1.750.000.000,00
26.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp. 400.000.000,00
27.	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 200.000.000,00
28.	Inspektorat	Rp. 150.000.000,00
29.	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	Rp. 25.000.000,00
30.	Dinas Pendapatan Daerah	Rp. 300.000.000,00
31.	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	Rp. 100.000.000,00
32.	Kecamatan Magetan	Rp. 35.000.000,00
33.	Kelurahan Magetan	Rp. 35.000.000,00
34.	Kelurahan Selosari	Rp. 35.000.000,00
35.	Kelurahan Tambran	Rp. 35.000.000,00
36.	Kelurahan Kepolorejo	Rp. 35.000.000,00
37.	Kelurahan Kebonagung	Rp. 35.000.000,00
38.	Kelurahan Tawanganom	Rp. 35.000.000,00
39.	Kelurahan Bulukerto	Rp. 35.000.000,00
40.	Kelurahan Mangkujayan	Rp. 35.000.000,00
41.	Kelurahan Sukowinangun	Rp. 35.000.000,00
42.	Kecamatan Panekan	Rp. 35.000.000,00
43.	Kelurahan Panekan	Rp. 35.000.000,00
44.	Kecamatan Plaosan	Rp. 35.000.000,00
45.	Kelurahan Plaosan	Rp. 35.000.000,00
46.	Kelurahan Sarangan	Rp. 35.000.000,00
47.	Kecamatan Poncol	Rp. 35.000.000,00
48.	Kelurahan Alastuwo	Rp. 35.000.000,00
49.	Kecamatan Parang	Rp. 35.000.000,00
50.	Kelurahan Parang	Rp. 35.000.000,00
51.	Kecamatan Lembeyan	Rp. 35.000.000,00
52.	Kelurahan Lembeyan Kulon	Rp. 35.000.000,00
53.	Kecamatan Takeran	Rp. 35.000.000,00
54.	Kelurahan Takeran	Rp. 35.000.000,00
55.	Kecamatan Kawedanan	Rp. 35.000.000,00
56.	Kelurahan Kawedanan	Rp. 35.000.000,00

1	2	3	
57.	Kelurahan Sampung	Rp.	35.000.000,00
58.	Kelurahan Rejosari	Rp.	35.000.000,00
59.	Kecamatan Bendo	Rp.	35.000.000,00
60.	Kelurahan Bendo	Rp.	35.000.000,00
61.	Kecamatan Maospati	Rp.	35.000.000,00
62.	Kelurahan Maospati	Rp.	35.000.000,00
63.	Kelurahan Mranggen	Rp.	35.000.000,00
64.	Kelurahan Kraton	Rp.	35.000.000,00
65.	Kecamatan Barat	Rp.	35.000.000,00
66.	Kelurahan Tebon	Rp.	35.000.000,00
67.	Kelurahan Mangge	Rp.	35.000.000,00
68.	Kecamatan Karangrejo	Rp.	35.000.000,00
69.	Kelurahan Karangrejo	Rp.	35.000.000,00
70.	Kelurahan Manisrejo	Rp.	35.000.000,00
71.	Kecamatan Sukomoro	Rp.	35.000.000,00
72.	Kelurahan Tinap	Rp.	35.000.000,00
73.	Kecamatan Kartoharjo	Rp.	35.000.000,00
74.	Kecamatan Karas	Rp.	35.000.000,00
75.	Kecamatan Ngariboyo	Rp.	35.000.000,00
76.	Kecamatan Nguntoronadi	Rp.	35.000.000,00
77.	Kecamatan Sidorejo	Rp.	35.000.000,00
78.	Badan Ketahanan Pangan	Rp.	150.000.000,00
79.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp.	250.000.000,00
80.	Kantor Arsip dan Perpustakaan	Rp.	100.000.000,00
81.	Dinas Pertanian	Rp.	400.000.000,00
82.	Dinas Peternakan dan Perikanan	Rp.	250.000.000,00
83.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp.	250.000.000,00
84.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	Rp.	350.000.000,00
85.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp.	250.000.000,00
	JUMLAH	Rp.	13.800.000.000,00

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 SUCHESTARI, SH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680803 199503 2 002